

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI BIRO PEMERINTAHAN

A. VISI

“TERWUJUDNYA KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS”

- Pelayanan adalah cara melayani, membantu menyiapkan, dan mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekelompok orang, artinya obyek yang dilayani adalah individu, pribadi-pribadi, dan kelompok organisasi. Jadi, dalam setiap pelayanan selalu terjadi tindakan atau upaya dari pihak yang melayani, untuk memenuhi kebutuhan pihak yang dilayani. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan publik dan pelayanan *civil* dalam arti proses, *output (product)*, dan *outcome* (manfaat) yang bersifat istimewa dibutuhkan oleh manusia dan diproses sesuai dengan aspirasi manusia pula. Pelayanan dalam suatu proses pemerintahan bermakna penyediaan kemudahan dan kemanfaatan kepada Yang diperintah/masyarakat/ rakyat/pelanggan. atau ada sesuatu yang disampaikan, disajikan, atau dilakukan oleh pihak yang melayani kepada yang dilayani. “Sesuatu” inilah yang disebut layanan yang merupakan hasil dari pelayanan.

B. MISI

Agar Visi dimaksud dapat tercapai maka Misi yang diemban adalah :

1. Meningkatkan efektivitas dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Umum, yang meliputi : Fasilitasi pelayanan di bidang Pertanahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta tugas umum pemerintahan lainnya;
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta tertib administrasi/urusan tata usaha biro, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan urusan umum yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok Organisasi Biro Pemerintahan;

3. Mewujudkan kemandirian daerah melalui implementasi otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dengan menjamin keserasian hubungan pemerintahan antar daerah :
4. Tertatanya pengembangan wilayah/daerah otonomi baru serta desa/kota secara demokratis,
5. Memfasilitasi proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat Daerah dan pejabat politik baik Provinsi, Kabupaten/Kota;
6. Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib, efektif dan efisien serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan civil.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1. Tujuan

- a) Mewujudkan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan melalui peningkatan intensitas koordinasi pemerintahan;
- b) Meningkatkan sinkronisasi, koordinasi pembinaan dan pengawasan permasalahan pertanahan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota
- c) Mewujudkan komunikasi pemerintahan yang efektif antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
- d) Meningkatkan koordinasi organisasi/kelembagaan yang menangani pembinaan trantibmas;
- e) Meningkatkan kinerja aparatur dalam rangka pelayanan prima;
- f) Menyelenggarakan implementasi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara lancar, baik dalam konteks administratif maupun politik menuju kemandirian daerah;
- g) Mewujudkan sistem Administrasi Kependudukan yang efektif, efisien, valid dan representatif;
- h) Membentuk daerah otonom baru (Provinsi, Kabupaten/Kota) sebagai suatu entitas baik geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- i) Melaksanakan berbagai kerjasama pemerintahan baik yang tergabung dalam Provinsi Kepulauan, Mitra Praja Utama, Tripartiet, APPSI dan maupun kerjasama dengan para pihak lainnya;

- j) Menyelenggarakan rekrutmen kepemimpinan pemerintahan Daerah secara demokratis;
- k) Menyelenggaraan pembinaan, koordinasi dan pengawasan pemerintahan perkotaan, keluarahan dan Desa secara baik
- l) Menjamin keutuhan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Sasaran

- a) Terwujudnya kesamaan persepsi, kesepakatan dan komitmen antar Pemerintah Kabupaten/Kota maupun antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.;
- b) Teratasinya pelayanan pertanahan, terwujudnya suasana ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, teratasinya konflik antar dan intra Pemerintah Kab/Kota;
- c) Terwujudnya komunikasi pemerintahan yang efektif antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
- d) Terwujudnya koordinasi masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTT
- e) Terselenggaranya administrasi/urusan tata usaha biro, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan urusan umum yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok Organisasi Biro Pemerintahan secara efektif, efisien, dan tertib;
- f) Terwujudnya delegasi kewenangan baik urusan wajib maupun pilihan kepada Pemerintah Daerah dan meningkatnya kemampuan Daerah Otonom dan meningkatnya kualitas tugas –tugas pemerintahan daerah;
- g) Terselenggaranya Administrasi kependudukan secara tertib, efisien, efektif, valid dan representatif melalui penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan dalam rangka pelayanan publik dan civil;
- h) Terfasilitasinya pemekaran/pengembangan wilayah/daerah, batas wilayah administrasi pemerintahan Kab/Kota Terbentuknya daerah otonom baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- i) Meninkatnya kerjasama pemerintahan antar daerah baik yang tergabung dalam Provinsi Kepulauan, Mitra Praja Utama,Tripartit, APPSI, maupun kerjasama dengan para pihak lainnya dan terciptanya *good governance* serta demokratisasi di tingkat lokal Nusa Tenggara Timur;
- j) Terfasilitasinya administrasi Pemilihan Kepala Daerah dan Serta Penggantian antar Waktu pejabat Daerah di Kab/Kota dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- k) Meningkatnya pemerintahan perkotaan, Kelurahan dan Desa baik dari aspek ekonomi, politik maupun sosial budaya:
- l) Terwujudnya pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

TABEL 4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Pemerintahan
(terlampir)

4.3. STRATEGIS DAN KEBIJAKAN BIRO PEMERINTAHAN

1. STRATEGI

a. Strategi S-O:

1. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan pemerintahan daerah yang berorientasi pemecahan masalah (problem solving oriented) dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
2. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah berdasarkan lingkup bidang kewenangan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Nusa Tenggara Timur.
3. Pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah untuk perbaikan kinerja dari waktu ke waktu yang diarahkan untuk melaksanakan komitmen pemerintah dalam implementasi pemberdayaan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang didukung dengan alokasi anggaran pembangunan yang berpihak pada masyarakat dengan Paradigma Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah).
4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.
5. Pemberdayaan SDM melalui peningkatan kompetensi dan mutu kerja, serta pemberian rincian Tupoksi yang jelas.
6. Penerapan metode pembagian habis tugas dan pemanfaatan peralatan pendukung secara tepat guna dan tepat fungsi.

b. Strategi W-O:

1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas perencanaan anggaran Biro-biro, termasuk pengendalian pelaksanaannya sesuai target kinerja.
2. Peningkatan penerapan rewards and punishment dalam pembinaan karier PNS Biro-biro.

3. Peningkatan Kualitas SDM Biro-biro melalui berbagai kegiatan kursus dan Diklat yang relevan dengan Tupoksi Biro.
 4. Pengadaan perangkat kerja secara selektif sesuai beban kerja dan ketersediaan anggaran.
 5. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah dan reformulasi TUPOKSI sesuai prinsip pembagian habis tugas.
 6. Rasionalisasi proses rekrutmen PNS sesuai kebutuhan dan permasalahan spesifik Daerah.
- c. Strategi S-T:
1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi penerapan aturan dalam pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah Provinsi.
 2. Peningkatan kualitas koordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah Provinsi dalam penyusunan kebijakan dan keterpaduan program berdasarkan lingkup bidang kewenangan.
 3. Peningkatan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk penyamaan persepsi mengenai peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
 4. Peningkatan keterpaduan program dan percepatan kegiatan asistensi lintas Instansi/ Satuan Kerja Pengelola Program/ Kegiatan/ Proyek, Tim Anggaran Eksekutif, DJA dan DPRD.
 5. Peningkatan koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Instansi Pengawas dan penegak persuasif dalam rangka menekan kebocoran dana pembangunan.
 6. Peningkatan pemahaman terhadap berbagai ketentuan menyangkut pengelolaan anggaran pembangunan serta pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- d. Strategi W-T:
1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas perencanaan anggaran Biro, termasuk pengendalian pelaksanaannya sesuai target kinerja.
 2. Peningkatan penerapan rewards and punishment dalam pembinaan karier PNS Biro-biro.
 3. Melakukan kerjasama/ kemitraan dengan pihak ketiga (pemerintah pusat/ Negara asing/ daerah lain/ swasta) untuk

Peningkatan Kualitas SDM Biro-biro melalui berbagai kegiatan kursus dan Diklat yang relevan dengan Tupoksi Biro-biro.

4. Sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan tupoksi.
5. Pengadaan perangkat kerja secara selektif dengan hibah.
6. Pendekatan persuasive dalam rangka peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ kota.
7. Evaluasi berkala kinerja dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan, termasuk pengadaan barang/ jasa pemerintah.

2. KEBIJAKAN

- a. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik Dan Pelayanan Berbasis Masyarakat Di Provinsi, Kabupaten Dan Kota
- b. Mewujudkan Supremasi Hukum Di Daerah.
- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Rakyat Di Daerah.
- d. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Perekonomian Dan Pembangunan Di Daerah.
- e. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah Yang Akuntabel.
- f. Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender (KKG), Serta Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak Di Daerah.
- g. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Secara Profesional, Cepat, Tepat Dan Terpadu Kepada Seluruh Aparatur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pusat.
- h. Meningkatkan Layanan Administrasi Kepegawaian Kepada Aparatur Pemerintah Provinsi, Kabupaten Dan Kota.
- i. Mewujudkan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Yang Tertib, Transparan, Akuntabel Dan Berorientasi Pada Kepentingan Publik Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
- j. Mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah Yang Berbasis Kinerja Dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

1. STRATEGI

Untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang meliputi pemerintah umum, pengembangan daerah dan pejabat/politik,

otonomi daerah, kependudukan dan catatan sipil secara baik, melalui strategi:

- a) Menggunakan aturan yang ada secara baik dan benar, termasuk implementasi kebijakan otda sebagai prakondisi bagi *good governance* (SO-1)
- b) Mendukung pemimpin dan kepemimpinan yang ada melalui dedikasi bawahan/staf agar tetap terpeliharanya atau sebagai jaminan untuk memperoleh dukungan politik DPRD dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Biro (SO-2).
- c) Pemberdayaan SDM yang tersedia (SO-3).
- d) Menumbuhkembangkan dedikasi bawahan/staf kepada pemimpin dan kepemimpinan serta efisiensi penggunaan dana demi eksistensi Biro (SO-4).
- e) Pemberian penghargaan dan sanksi secara proporsional (WO-2).
- f) Meningkatkan efisiensi prasarana dan sarana pendukung yang ada (WO-3).
- g) Penataan kewenangan berdasarkan aturan yang ada dan proaktif untuk solusi terhadap masih adanya ketidakjelasan arah dan tujuan kebijakan pusat (ST-1)

2. KEBIJAKAN

- a) Mengupayakan penerapan pemerintahan yang baik
- b) Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah
- c) Menata daerah otonom baru
- d) Menata administrasi kependudukan
- e) Melakukan perbaikan proses politik
- f) Mengupayakan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- g) Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal
- h) Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah NTT.
- i) Menfasilitasi konflik pertanahaan inter dan antar pemrintah provinsi dan kabupaten/Kota serta masyarakat.